

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**  
**DESA PEMERINTAH DESA BINANGUN**  
**KECAMATAN KECAMATAN WATUMALANG**  
**KABUPATEN WONOSOBO**

Periode Tahun 2019 - 2026

**RENCANA STRATEGIS DESA**

**VISI**

***Bekerja Keras Untuk Mewujudkan Pemerintahan Desa Yang Mandiri dan Akuntabel Serta Membangun dan  
Meningkatkan Kesejahteraan Bersama Rakyat Secara Berkesinambungan Melalui Pemberdayaan Masyarakat***

Periode 2019 - 2026

**MISI**

- 1 Mewujudkan pemerintahan desa yang baik dan tertib
- 2 Mewujudkan pemerintahan desa yang baik dan tertib
- 3 Mewujudkan Sarana Prasarana pendidikan yang memadai
- 4 Mewujudkan Sarana Prasarana pendidikan yang memadai
- 5 Mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat

- 6 Mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat
- 7 Mewujudkan peningkatan hasil pertanian dan peternakan warga
- 8 Mewujudkan peningkatan hasil pertanian dan peternakan warga
- 9 Mewujudkan Sarana Prasarana Kesehatan yang memadai
- 10 Mewujudkan Sarana Prasarana Kesehatan yang memadai

## **TUJUAN DAN SASARAN**

### **Tujuan 1: Tersedianya aparatur dan lembaga desa yang siap melayani**

- 1.1. Terjaminya kesejahteraan kepala desa
- 1.2. Terjaminya kesejahteraan kepala desa
- 1.3. Terjaminya kesejahteraan perangkat desa
- 1.4. Terjaminya kesejahteraan perangkat desa
- 1.5. Adanya jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa
- 1.6. Adanya jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa
- 1.7. Tersedianya operasional guna menunjang pelayanan desa
- 1.8. Tersedianya operasional guna menunjang pelayanan desa
- 1.9. Terjaminya kesejahteraan BPD
- 1.10. Terjaminya kesejahteraan BPD
- 1.11. Tersedianya operasional guna menunjang pelayanan BPD
- 1.12. Tersedianya operasional guna menunjang pelayanan BPD
- 1.13. Terjaminya kesejahteraan RT/RW
- 1.14. Terjaminya kesejahteraan RT/RW

### **Tujuan 2: Tersedianya aparatur dan lembaga desa yang siap melayani**

- 2.1. Terjaminya kesejahteraan kepala desa
- 2.2. Terjaminya kesejahteraan kepala desa
- 2.3. Terjaminya kesejahteraan perangkat desa
- 2.4. Terjaminya kesejahteraan perangkat desa
- 2.5. Adanya jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa
- 2.6. Adanya jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa
- 2.7. Tersedianya operasional guna menunjang pelayanan desa
- 2.8. Tersedianya operasional guna menunjang pelayanan desa
- 2.9. Terjaminya kesejahteraan BPD
- 2.10. Terjaminya kesejahteraan BPD
- 2.11. Tersedianya operasional guna menunjang pelayanan BPD
- 2.12. Tersedianya operasional guna menunjang pelayanan BPD
- 2.13. Terjaminya kesejahteraan RT/RW
- 2.14. Terjaminya kesejahteraan RT/RW

### **Tujuan 3: Terwujudnya tata pelayanan yang baik dengan sarana memadai**

- 3.1. Lengkapnya sarana perkantoran pemerintah desa
- 3.2. Lengkapnya sarana perkantoran pemerintah desa
- 3.3. Tidak terganggunya proses pelayanan kepada masyarakat
- 3.4. Tidak terganggunya proses pelayanan kepada masyarakat
- 3.5. Tersedianya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
- 3.6. Tersedianya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat

### **Tujuan 4: Terwujudnya tata pelayanan yang baik dengan sarana memadai**

- 4.1. Lengkapnya sarana perkantoran pemerintah desa
- 4.2. Lengkapnya sarana perkantoran pemerintah desa

- 4.3. Tidak terganggunya proses pelayanan kepada masyarakat
- 4.4. Tidak terganggunya proses pelayanan kepada masyarakat
- 4.5. Tersedianya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
- 4.6. Tersedianya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat

**Tujuan 5: Terwujudnya administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan yang baik**

- 5.1. Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
- 5.2. Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
- 5.3. Tersedianya Dokumen Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)
- 5.4. Tersedianya Dokumen Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)
- 5.5. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa yang baik
- 5.6. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa yang baik
- 5.7. Adanya Penyuluhan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 5.8. Adanya Penyuluhan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 5.9. Tersedinya Dokumen Pemetaan Kemiskinan Desa secara Partisipatif
- 5.10. Tersedinya Dokumen Pemetaan Kemiskinan Desa secara Partisipatif

**Tujuan 6: Terwujudnya administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan yang baik**

- 6.1. Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
- 6.2. Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
- 6.3. Tersedianya Dokumen Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)
- 6.4. Tersedianya Dokumen Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)
- 6.5. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa yang baik
- 6.6. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa yang baik
- 6.7. Adanya Penyuluhan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 6.8. Adanya Penyuluhan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

6.9. Tersedianya Dokumen Pemetaan Kemiskinan Desa secara Partisipatif

6.10. Tersedianya Dokumen Pemetaan Kemiskinan Desa secara Partisipatif

## **Tujuan 7: Terwujudnya Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang tertib**

7.1. Terselenggaranya Musyawarah Desa Reguler

7.2. Terselenggaranya Musyawarah Desa Reguler

7.3. Terselenggaranya Musyawarah Desa Non Reguler

7.4. Terselenggaranya Musyawarah Desa Non Reguler

7.5. Tersedianya Dokumen Perencanaan Desa

7.6. Tersedianya Dokumen Perencanaan Desa

7.7. Tersedianya Dokumen Keuangan Desa

7.8. Tersedianya Dokumen Keuangan Desa

7.9. Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Aset Desa

7.10. Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Aset Desa

7.11. Tersedianya Dokumen Kebijakan Desa non Rencana Pembangunan/Keuangan

7.12. Tersedianya Dokumen Kebijakan Desa non Rencana Pembangunan/Keuangan

7.13. Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

7.14. Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

7.15. Terciptanya Sistem Informasi Desa

7.16. Terciptanya Sistem Informasi Desa

7.17. Terselenggaranya Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa

7.18. Terselenggaranya Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa

7.19. Terselenggaranya Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayah, dan BPD

7.20. Terselenggaranya Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayah, dan BPD

7.21. Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayah

7.22. Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayah

## **Tujuan 8: Terwujudnya Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang tertib**

- 8.1. Terselenggaranya Musyawarah Desa Reguler
- 8.2. Terselenggaranya Musyawarah Desa Reguler
- 8.3. Terselenggaranya Musyawarah Desa Non Reguler
- 8.4. Terselenggaranya Musyawarah Desa Non Reguler
- 8.5. Tersedianya Dokumen Perencanaan Desa
- 8.6. Tersedianya Dokumen Perencanaan Desa
- 8.7. Tersedianya Dokumen Keuangan Desa
- 8.8. Tersedianya Dokumen Keuangan Desa
- 8.9. Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Aset Desa
- 8.10. Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Aset Desa
- 8.11. Tersedianya Dokumen Kebijakan Desa non Rencana Pembangunan/Keuangan
- 8.12. Tersedianya Dokumen Kebijakan Desa non Rencana Pembangunan/Keuangan
- 8.13. Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 8.14. Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 8.15. Terciptanya Sistem Informasi Desa
- 8.16. Terciptanya Sistem Informasi Desa
- 8.17. Terselenggaranya Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
- 8.18. Terselenggaranya Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
- 8.19. Terselenggaranya Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayah, dan BPD
- 8.20. Terselenggaranya Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayah, dan BPD
- 8.21. Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayah
- 8.22. Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayah

## **Tujuan 9: Terwujudnya administrasi pertanahan yang tertib**

- 9.1. Tersedianya Sertifikat Tanah Desa

- 9.2. Tersedianya Sertifikat Tanah Desa
- 9.3. Terselenggaranya Administrasi Pertanahan
- 9.4. Terselenggaranya Administrasi Pertanahan
- 9.5. Tersedianya Sertifikat Tanah Masyarakat Miskin
- 9.6. Tersedianya Sertifikat Tanah Masyarakat Miskin
- 9.7. Terselenggaranya Penyuluhan Pertanahan
- 9.8. Terselenggaranya Penyuluhan Pertanahan
- 9.9. Terselenggaranya Administrasi PBB
- 9.10. Terselenggaranya Administrasi PBB
- 9.11. Adanya Batas Tanah Desa yang jelas
- 9.12. Adanya Batas Tanah Desa yang jelas

#### **Tujuan 10: Terwujudnya administrasi pertanahan yang tertib**

- 10.1. Tersedianya Sertifikat Tanah Desa
- 10.2. Tersedianya Sertifikat Tanah Desa
- 10.3. Terselenggaranya Administrasi Pertanahan
- 10.4. Terselenggaranya Administrasi Pertanahan
- 10.5. Tersedianya Sertifikat Tanah Masyarakat Miskin
- 10.6. Tersedianya Sertifikat Tanah Masyarakat Miskin
- 10.7. Terselenggaranya Penyuluhan Pertanahan
- 10.8. Terselenggaranya Penyuluhan Pertanahan
- 10.9. Terselenggaranya Administrasi PBB
- 10.10. Terselenggaranya Administrasi PBB
- 10.11. Adanya Batas Tanah Desa yang jelas
- 10.12. Adanya Batas Tanah Desa yang jelas

#### **Tujuan 11: Terwujudnya proses pendidikan yang berkualitas di desa**

- 11.1. Tersedianya kesejahteraan guru pendidik di desa
- 11.2. Tersedianya kesejahteraan guru pendidik di desa
- 11.3. Tersedianya alat penunjang pendidikan
- 11.4. Tersedianya alat penunjang pendidikan
- 11.5. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pendidikan
- 11.6. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pendidikan
- 11.7. Tersedianya bahan bacaan bagi siswa
- 11.8. Tersedianya bahan bacaan bagi siswa
- 11.9. Tersedianya pemeliharaan sarana prasarana pendidikan
- 11.10. Tersedianya pemeliharaan sarana prasarana pendidikan
- 11.11. Tersedianya tempat belajar siswa
- 11.12. Tersedianya tempat belajar siswa
- 11.13. Tersedianya tempat bacaan siswa
- 11.14. Tersedianya tempat bacaan siswa
- 11.15. Terjaminnya kesejahteraan pengelola tempat bacaan siswa
- 11.16. Terjaminnya kesejahteraan pengelola tempat bacaan siswa
- 11.17. Meningkatnya pengetahuan siswa tentang seni
- 11.18. Meningkatnya pengetahuan siswa tentang seni

#### **Tujuan 12: Terwujudnya proses pendidikan yang berkualitas di desa**

- 12.1. Tersedianya kesejahteraan guru pendidik di desa
- 12.2. Tersedianya kesejahteraan guru pendidik di desa
- 12.3. Tersedianya alat penunjang pendidikan
- 12.4. Tersedianya alat penunjang pendidikan
- 12.5. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pendidikan
- 12.6. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pendidikan

- 12.7. Tersedianya bahan bacaan bagi siswa
- 12.8. Tersedianya bahan bacaan bagi siswa
- 12.9. Tersedianya pemeliharaan sarana prasarana pendidikan
- 12.10. Tersedianya pemeliharaan sarana prasarana pendidikan
- 12.11. Tersedianya tempat belajar siswa
- 12.12. Tersedianya tempat belajar siswa
- 12.13. Tersedianya tempat bacaan siswa
- 12.14. Tersedianya tempat bacaan siswa
- 12.15. Terjaminnya kesejahteraan pengelola tempat bacaan siswa
- 12.16. Terjaminnya kesejahteraan pengelola tempat bacaan siswa
- 12.17. Meningkatnya pengetahuan siswa tentang seni
- 12.18. Meningkatnya pengetahuan siswa tentang seni

### **Tujuan 13: Meningkatnya keamanan dan kenyamanan masyarakat**

- 13.1. Tersedianya kesejahteraan linmas
- 13.2. Tersedianya kesejahteraan linmas
- 13.3. Meningkatnya pengetahuan linmas
- 13.4. Meningkatnya pengetahuan linmas
- 13.5. Terjalinya koordinasi yang baik antar satuan keamanan
- 13.6. Terjalinya koordinasi yang baik antar satuan keamanan
- 13.7. Tersedianya kesiapan menangani bencana lokal desa
- 13.8. Tersedianya kesiapan menangani bencana lokal desa
- 13.9. Tersedianya pos bencana lokal bagi masyarakat
- 13.10. Tersedianya pos bencana lokal bagi masyarakat
- 13.11. Tersedianya bantuan hukum bagi aparat dan masyarakat
- 13.12. Tersedianya bantuan hukum bagi aparat dan masyarakat

13.13. Meningkatnya kesadaran akan hukum

13.14. Meningkatnya kesadaran akan hukum

#### **Tujuan 14: Meningkatnya keamanan dan kenyamanan masyarakat**

14.1. Tersedianya kesejahteraan linmas

14.2. Tersedianya kesejahteraan linmas

14.3. Meningkatnya pengetahuan linmas

14.4. Meningkatnya pengetahuan linmas

14.5. Terjalinya koordinasi yang baik antar satuan keamanan

14.6. Terjalinya koordinasi yang baik antar satuan keamanan

14.7. Tersedianya kesiapan menangani bencana lokal desa

14.8. Tersedianya kesiapan menangani bencana lokal desa

14.9. Tersedianya pos bencana lokal bagi masyarakat

14.10. Tersedianya pos bencana lokal bagi masyarakat

14.11. Tersedianya bantuan hukum bagi aparat dan masyarakat

14.12. Tersedianya bantuan hukum bagi aparat dan masyarakat

14.13. Meningkatnya kesadaran akan hukum

14.14. Meningkatnya kesadaran akan hukum

#### **Tujuan 15: Tercukupinya kesejahteraan masyarakat desa**

15.1. Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan hasil pertanian

15.2. Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan hasil pertanian

15.3. Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan hasil peternakan

15.4. Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan hasil peternakan

15.5. Tersedianya lumbung pangan bagi masyarakat

15.6. Tersedianya lumbung pangan bagi masyarakat

- 15.7. Tidak ada kendala dalam proses pengelolaan
- 15.8. Tidak ada kendala dalam proses pengelolaan
- 15.9. Meningkatnya pengetahuan bagi petani dan peternak
- 15.10. Meningkatnya pengetahuan bagi petani dan peternak
- 15.11. Adanya sarana baru guna peningkatan hasil
- 15.12. Adanya sarana baru guna peningkatan hasil

#### **Tujuan 16: Tercukupinya kesejahteraan masyarakat desa**

- 16.1. Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan hasil pertanian
- 16.2. Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan hasil pertanian
- 16.3. Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan hasil peternakan
- 16.4. Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan hasil peternakan
- 16.5. Tersedianya lumbung pangan bagi masyarakat
- 16.6. Tersedianya lumbung pangan bagi masyarakat
- 16.7. Tidak ada kendala dalam proses pengelolaan
- 16.8. Tidak ada kendala dalam proses pengelolaan
- 16.9. Meningkatnya pengetahuan bagi petani dan peternak
- 16.10. Meningkatnya pengetahuan bagi petani dan peternak
- 16.11. Adanya sarana baru guna peningkatan hasil
- 16.12. Adanya sarana baru guna peningkatan hasil

#### **Tujuan 17: Terwujudnya masyarakat yang sehat berkualitas**

- 17.1. Tersedianya Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa
- 17.2. Tersedianya Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa
- 17.3. Tersedianya Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
- 17.4. Tersedianya Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

- 17.5. Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya
- 17.6. Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya
- 17.7. Tersedianya makanan tambahan bagi Balita dan Ibu Hamil
- 17.8. Tersedianya makanan tambahan bagi Balita dan Ibu Hamil
- 17.9. Tersedianya Insentif Kader Posyandu
- 17.10. Tersedianya Insentif Kader Posyandu
- 17.11. Tersedianya Kelas Ibu Hamil dan Kelas Lansia
- 17.12. Tersedianya Kelas Ibu Hamil dan Kelas Lansia
- 17.13. Adanya Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
- 17.14. Adanya Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
- 17.15. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- 17.16. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- 17.17. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
- 17.18. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
- 17.19. Terselenggaranya kegiatan Keluarga Berencana melalui Kampung KB (insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga, PIK-R, UPPKS dan kegiatan layanan KKBPK lainnya)
- 17.20. Terselenggaranya kegiatan Keluarga Berencana melalui Kampung KB (insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga, PIK-R, UPPKS dan kegiatan layanan KKBPK lainnya)
- 17.21. Tersedianya Peralatan Kesehatan Posyandu/Polindes/PKD
- 17.22. Tersedianya Peralatan Kesehatan Posyandu/Polindes/PKD

## **Tujuan 18: Terwujudnya masyarakat yang sehat berkualitas**

- 18.1. Tersedianya Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa
- 18.2. Tersedianya Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa
- 18.3. Tersedianya Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
- 18.4. Tersedianya Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

- 18.5. Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya
- 18.6. Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya
- 18.7. Tersedianya makanan tambahan bagi Balita dan Ibu Hamil
- 18.8. Tersedianya makanan tambahan bagi Balita dan Ibu Hamil
- 18.9. Tersedianya Insentif Kader Posyandu
- 18.10. Tersedianya Insentif Kader Posyandu
- 18.11. Tersedianya Kelas Ibu Hamil dan Kelas Lansia
- 18.12. Tersedianya Kelas Ibu Hamil dan Kelas Lansia
- 18.13. Adanya Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
- 18.14. Adanya Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
- 18.15. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- 18.16. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- 18.17. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
- 18.18. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
- 18.19. Terselenggaranya kegiatan Keluarga Berencana melalui Kampung KB (insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga, PIK-R, UPPKS dan kegiatan layanan KKBPK lainnya)
- 18.20. Terselenggaranya kegiatan Keluarga Berencana melalui Kampung KB (insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga, PIK-R, UPPKS dan kegiatan layanan KKBPK lainnya)
- 18.21. Tersedianya Peralatan Kesehatan Posyandu/Polindes/PKD
- 18.22. Tersedianya Peralatan Kesehatan Posyandu/Polindes/PKD

## MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

## 01 - BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

## 01.01. - Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa



## 01.02. - Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa

## 01.03. - Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

## 01.04. - Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan





## 01.05. - Sub Bidang Pertanahan

No	Kegiatan	Lokasi	Keluaran	Sasaran	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8
4	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	Desa Binangun	-	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	Desa Binangun	-	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	Desa Binangun	-	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	Mediasi Konflik Pertanahan	Desa Binangun	-	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	Mediasi Konflik Pertanahan	Desa Binangun	-	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	Penyuluhan Pertanahan	Desa Binangun	-	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	Penyuluhan Pertanahan	Desa Binangun	-	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Binangun	-	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Binangun	-	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih)	Desa Binangun	-	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih)	Desa Binangun	-	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	Desa Binangun	-	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	Desa Binangun	-	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

## 02 - BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

## 02.01. - Sub Bidang Pendidikan



## 02.02. - Sub Bidang Kesehatan





## 02.03. - Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



## 02.04. - Sub Bidang Kawasan Pemukiman



## 02.05. - Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

## 02.06. - Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

## 02.07. - Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral

## 02.08. - Sub Bidang Pariwisata

## 03 - BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

## 03.01. - Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Kegiatan	Lokasi	Keluaran	Sasaran	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8
9	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Desa Binangun	-	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Desa Binangun	-	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Desa Binangun	-	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Desa Binangun	-	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	Desa Binangun	-	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	Desa Binangun	-	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Desa Binangun	-	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Desa Binangun	-	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### 03.02. - Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

No	Kegiatan	Lokasi	Keluaran	Sasaran	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8
----	----------	--------	----------	---------	----	----	----	----	----	----	----	----

1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa Binangun	-	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa Binangun	-	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	Desa Binangun	-	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	Desa Binangun	-	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Desa Binangun	-	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Desa Binangun	-	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	Desa Binangun	-	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	Desa Binangun	-	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih)	Desa Binangun	-	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

10	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih)	Desa Binangun	-	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Desa Binangun	-	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Desa Binangun	-	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### **03.03. - Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**

### **03.04. - Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**

## 04 - BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

## 04.01. - Sub Bidang Kelautan dan Perikanan



## 04.02. - Sub Bidang Pertanian dan Peternakan



#### 04.03. - Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

#### **04.04. - Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**

## 04.05. - Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)

#### **04.06. - Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal**

## 04.07. - Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

## 05 - BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

## 05.01. - Sub Bidang Penanggulangan Bencana

## 05.02. - Sub Bidang Keadaan Darurat

## 05.03. - Sub Bidang Keadaan Mendesak

No	Kegiatan	Lokasi	Keluaran	Sasaran	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8
1	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa Binangun	-	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa Binangun	-	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Dicetak pada: 07 December 2025, 11:50 WIB*